

*Pengkuh Agamana  
Luhung Elmuna  
Jembar Budaya*

MEDIA UNIVERSITAS PASUNDAN

**al mizan**

KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI



# **STRONG GOVERNMENT DI TENGAH-TENGAH MULTIPARTAI**



ISSN : 0852-839 X

EDISI No. 139/APRIL 2009



### Perintis

Prof. H.R. Muchtar Affandi, Drs.  
Prof. Dr. H. Tb Hasanuddin, M.Sc., Ak.Pub.  
Prof. H. Cecep Syarifudin, Drs.  
H. M. Munir Djamil, Drs., M.M.  
R.H. Hidayat Suryalaga, Drs.

### Pelindung Rektor Universitas Pasundan

### Narasumber

Direktur Pascasarjana  
Para Dekan  
Para Ketua Lembaga

### Pimpinan Umum

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si.

### Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si.  
Prof. Dr. H. Asep Syamsulbachri, M.Pd.  
Yaya Mulyana Abdul Azis, Drs., M.Si.  
Dr. H. Ali Anwar, Drs. M.Si.  
Sutrisno, S.Sos., M.Si.

### Pimpinan Redaksi

M. Idris Nawawi, Drs., M.Ag.

### Sekretaris Redaksi

Maman Jamaluddin Yusuf, Drs., M.Ag.

### Staf Redaksi

Tatang Sumarsono  
Titin Nurhayatin, Dra., M.Pd.  
Ahmad Abdul Ghani, S.H., Drs., M.Ag.

### Tata Rupa

Nurul Mu'min, S.Pd.

### Tata Usaha

Iceu Dahmalia  
Hj. Henni Zahro'aini, S.Pd.

### Pemasaran/Sirkulasi

Ahmad Sofi, Drs.  
Herman

### Dokumentasi

Adeng Juanda, S.Pd.

Foto-foto Sampul Halaman  
[www.media.unpas.ac.id](http://www.media.unpas.ac.id)

Setting/Lay out/Produksi  
Sarwayasa / 0818221189

ISSN 0852-839 X Al Mizan No.134/Julii 2007

### ALAMAT REDAKSI

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  
Sya'ar Islam (LPPSI) Unpas  
Jl. Tamansari 6-8 Bandung-40116  
Telp (022) 4201677 - 4205832  
<http://www.unpas.ac.id>

ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB  
PERCETAKAN

### Daftar Isi

*Assalamu'alaikum - i*

### Jepik Utama

AKANKAH PEMEKARAN DAERAH MELAHIRKAN  
"STRONG GOVERNMENT" YANG DIKUTI DENGAN  
PRAKARSA OTONOMI PEMERINTAHAN DESA  
Dr. H. Thomas Bustomi, Drs., M.Si. 1 - 5  
STRONG GOVERNMENT, SISTEM MULTIPARTAI DAN  
PENGUATAN DEMOKRASI PROFETIK  
Drs. Deden Ramdhan, M.Si. 6 - 11  
MENERAWANG PEMILU 2009  
Drs. Ade Priangani, M.Si. 12 - 14  
MULTIPARTAI: MENGUATKAN ATAU MELEMAHKAN  
PEMERINTAHAN  
Dra. Imas Sumiati, M.Si. 15 - 18  
PROBLEMATIKA PRESIDENSIAL DI TENGAH-TENGAH  
SISTEM MULTIPARTAI  
Drs. Awang Munawar, M.Si. 19 - 25  
PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA DI TENGAH  
"GURITA" MULTIPARTAI Citra dalam Trend Politik  
Drs. Achdiat, M.Si. 26 - 30  
KONTROVERSI RETORIKA POLITIK MENJELANG  
PEMILU 2009  
Drs. Sutrisno, M.Si. 31 - 34

### Cakrawala Umiyah

APARATUR VISIONER DAN CORPORATE CULTURE  
MENUJU STRONG GOVERNMENT  
Heri Erlangga, S.Sos., M.Pd. 35 - 39  
MERETAS KEPEMIMPINAN IDEAL PARA CALEG  
ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN  
Ida Hindarsah, S.Sos., M.M., M.Si. 40 - 44  
KOMUNIKASI POLITIK MELALUI FOTO CALEG  
Heriwanto, S.Sn. 45 - 47

### Nuansa Islami

ZAKAT, SEBAGAI POTENSI UMAT PENDUKUNG  
PENGUATAN EKONOMI RAKYAT  
Dra. Trisa Nur Kania, M.Si. 48 - 51  
DILEMA PEREMPUAN: PERAN PEREMPUAN DI  
MASYARAKAT DAN RUMAH TANGGA  
Drs. Ahmad Abdul Gani, M.Ag. 52 - 56

### Interupsi

PEMILU 2009 SEMOGA BUKAN HANYA HARAPAN  
UNTUK UMUM  
Prof. Dr. H. Asep Sjamsulbachri, M.Pd. 57 - 58

### MAJALAH AL MIZAN

Izin Terbit: SK Menteri Penerangan RI No.136/SK/ Ditjen D  
PPG/STT/1988. ISSN. 0852-839 X Diterbitkan oleh: Penerbit LPP  
Unpas Bandung.  
Redaksi menerima tulisan/naskah yang tidak bersambung diketik r  
1,5 spasi ukuran A4 diharapkan maksimal 5 halaman yang mencat  
Abstrak, Daftar Pustaka, dan 1 (satu) buah Pas Foto. Untuk su  
menyurat, lampirkan identitas Poto Copy KTP/SIM. Atau naskah b  
dikirim melalui email: [almizan@unpas.ac.id](mailto:almizan@unpas.ac.id). Redaksi da  
memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi c  
maksudnya.



*Drs. Ahmad Abdul Gani, M.Ag.*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

## DILEMA PEREMPUAN : PERAN PEREMPUAN DI MASYARAKAT DAN RUMAH TANGGA

Harus diakui, laki-laki 'tak akan bisa hidup' tanpa perempuan. Namun sayangnya 'ketakbisaan' hidup ini, oleh sebagian orang dibatasi dalam lingkaran sempit, yaitu dalam hal-hal tertentu saja seperti dalam hal urusan yang berhubungan dengan rumah tangga saja. Padahal, dalam lingkungan yang lebih luas dari itu, perempuan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini dibuktikan dengan peran berbagai perempuan yang berkiprah secara positif di berbagai bidang yang selama ini hanya 'dikuasai' kaum laki-laki. Namun, tentu saja kiprah perempuan ini masih dalam batas yang wajar sesuai porsinya, tanpa melanggar syariat Islam.

Namun dalam waktu yang bersamaan di masyarakat saat ini kita dengan mudah melihat peran perempuan yang terpinggirkan baik secara kultural mau pun struktural dalam berbagai segmen kehidupan. Pada kondisi seperti ini, maka perempuan hanya dipandang sebagai individu yang tidak lebih baik kualitasnya dari kaum laki-laki.

Banyak aspek yang menyebabkan kondisi peran perempuan yang terpinggirkan, di antaranya rendahnya tingkat kualitas (pendidikan) perempuan yang mengakibatkan rendahnya pemahaman perempuan terhadap peran yang sebenarnya.

Selain itu pula adanya pergeseran pandangan terhadap upaya reposisi peran perempuan yang kebablasan sehingga upaya yang dilakukan hanyalah sebatas ingin mensejajarkan diri seorang perempuan dengan kaum laki-laki semata, tetapi justru langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mengorbankan kodrat sebagai perempuan.

Untuk itu kita perlu membuat pandangan baru dalam bentuk penempatan peran perempuan secara tepat di masyarakat yang terus mengalami perubahan yang masif tanpa menghilangkan peran dasar perempuan seperti yang dimaksudkan dalam syariat Islam.

### Perempuan dalam Islam

Islam seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an mengangkat kedudukan perempuan kepada martabat yang tidak pernah diimpikan orang pada masa-masa sebelum Islam. Islam menjaga kebebasan dan kemerdekaan pribadi seorang perempuan. KEPADANYA Islam memberi hak untuk memiliki dan menentukan sendiri penggunaan kekayaan yang menjadi miliknya. Suami atau pun ayahnya sekalipun sama sekali tidak berhak dan tidak boleh menguasai kekayaan yang khusus menjadi milik istri atau anak perempuannya.

Itulah sebabnya Islam sangat ketat dalam usahanya menjaga dan melindungi keselamatan perempuan secara langsung, yaitu dengan membebaskan kewajiban kepada kaum laki-laki supaya melaksanakan tugas memberi perlindungan kepada kaum perempuan, agar dalam masyarakat tidak terdapat perempuan yang berbuat penyelewengan akibat desakan kebutuhan hidupnya.

Namun mengingat perubahan kehidupan sosial ekonomi saat ini memaksa perempuan yang mencari nafkah dan pekerjaan untuk kehidupannya, sehingga saat ini suatu yang wajar sehingga pada posisi ini perempuan memiliki peran ganda.

Sebanarnya peran ganda yang disandang kaum perempuan yang berkiprah di kehidupan publik bukanlah sesuatu yang baru karena dalam sejarah Islam kita melihat bagaimana peran Siti Khadijah istri Nabi SAW yang berperan sebagai pengusaha yang sukses tanpa mengurangi perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengelola urusan domestik di keluarga Rasulullah SAW. Bahkan Siti Khadijah dengan harta yang dimilikinya ikut berjuang mendukung sepenuhnya dakwah Nabi SAW, sehingga diriwayatkan dalam sebuah hadits ia telah ditetapkan sebagai seorang yang akan menjadi ahli surga.

Agar peran ganda yang disandang perempuan berjalan dengan baik, maka perempuan tentunya harus memiliki bekal dalam menjalani peran ganda tersebut. Bekal tersebut hanya dapat diraih melalui pendidikan dan akhlak yang baik. Akan tetapi, perkembangan lebih lanjut telah mengaburkan dan mencampuradukan antara sarana dan tujuan.

Kaum perempuan yang pada mulanya menuntut ilmu pengetahuan untuk dapat menunaikan amanat yang fitrahkan kepa-

danya, namun dewasa ini ternyata telah berubah sedemikian rupa. Sekarang kaum perempuan menuntut ilmu pengetahuan guna dapat bekerja menurut pandangannya sendiri dan guna melaksanakan tugas-tugas menurut kemauannya sendiri. Saat ini bekerja bagi perempuan yang semula dipandang sebagai sarana kini telah berubah menjadi tujuan pokok dalam belajar menuntut ilmu. Waktu dan kegiatan yang semestinya harus dicurahkan kepada tujuan pokok sebagai perempuan, sekarang dihabiskan untuk bekerja mencari nafkah.

Pada mulanya pendidikan bagi kaum perempuan merupakan sarana agar perempuan dapat menunaikan tugas keibuannya dengan sempurna, tetapi kemudian berubah menjadi sarana untuk memperoleh pekerjaan dan untuk mempersiapkan serta menghindarkan diri dari kemungkinan hidup menderita, tidak lebih dari itu. Gejala-gejala yang timbul dari pencampur adukkan menuntut ilmu pengetahuan oleh perempuan dapat kita saksikan dari apa yang sering disebut dengan nama emansipasi.

Sebenarnya Islam tidak melarang sama sekali untuk menuntut ilmu dan keterampilan untuk bekal hidupnya, termasuk kaum perempuan. Karena kita yakin bahwa kaum perempuan dalam kondisi masyarakat dewasa ini, tidak bisa tidak mesti bekerja dan harus berperan serta secara positif dalam kegiatan pembangunan bangsa.

### Diskriminasi terhadap Peran Perempuan

Secara normatif perlakuan terhadap perempuan seharusnya tidak berbeda dengan perlakuan yang dilakukan terhadap kaum laki-laki,

karena agama maupun negara telah menjamin hal tersebut. Namun dalam tataran empiris kita melihat adanya diskriminasi terhadap posisi perempuan dalam berbagai segmen kehidupan. Perempuan pada tataran tertentu diposisikan di bawah kendali laki-laki sehingga menimbulkan dikotomi urusan kehidupan, yaitu kehidupan domestik milik perempuan dan kehidupan publik menjadi milik kaum laki-laki.

Dalam konteks Indonesia diskriminasi terhadap posisi perempuan hampir merata ada dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang politik kita melihat perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam urusan pengambilan keputusan karena hanya ada 10% perempuan yang menjadi menteri dari 30 menteri yang ada. Begitu pula dalam di parlemen hanya ada 16% perempuan dari jumlah anggota parlemen 550 orang.

Diskriminasi terhadap perempuan untuk dapat berkiprah lebih luas dalam berbagai urusan publik terjadi bukan saja secara kultural tetapi secara tidak langsung tercipta secara struktural dengan lahirnya aturan-aturan yang seperti menyempitkan peran perempuan. Contoh aktual adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan suara terbanyak bagi calon legislatif (DPR) yang ditetapkan untuk menjadi calon legislatif terpilih 2009-2014. Padahal sebelum ada keputusan MK kaum perempuan yang memiliki kuota minimal 30% calon legislatif yang diajukan oleh partai memiliki peluang lebih besar untuk dapat masuk ke senayan. Namun dengan ada keputusan MK tersebut, maka calon legislatif perempuan harus bersaing secara penuh dengan calon legislatif laki-laki padahal kita harus mengakui jumlah calon legislatif perempuan yang berkualitas

masih kalah jauh dari calon legislatif laki-laki.

Diskriminasi yang dialami perempuan tentunya berdampak bukan saja terhadap perempuan itu sendiri tetapi akan memiliki dampak terhadap masyarakat luas karena perempuan sebagai pengendali urusan domestik dimana awal pendidikan dasar yang diberikan kepada anak terjadi akan terganggu yang berakibat terancamnya kualitas SDM bangsa. Bahkan keberhasilan laki-laki tidak terlepas dari kematangan perempuan dalam mengelola urusan domestik. Jadi jika terjadi gangguan terhadap peran perempuan, maka sebenarnya eksistensi laki-laki juga tentunya akan terganggu.

Namun demikian, perempuan tentunya jangan disamakan dengan kaum laki-laki karena secara fitrah kondisi perempuan dan laki-laki berbeda. Sehingga tentunya perlu ada aturan khusus yang dapat menghilangkan diskriminasi tersebut. Perempuan yang secara fisik lebih lemah dengan laki-laki tentunya akan kalah bersaing jika harus berkompetisi dengan laki-laki jika persaingan tersebut memerlukan kemampuan fisik.

Dalam hal mendapatkan akses terhadap fasilitas umum tampaknya kaum perempuan selalu kalah bersaing dengan kaum laki-laki. Misalnya, untuk mendapatkan akses transportasi, perempuan Indonesia akan selalu kalah bersaing dengan kaum laki-laki. Ini terjadi karena untuk mendapatkan layanan transportasi di Indonesia memerlukan mobilitas dan fisik yang kuat. Padahal di beberapa negara maju alat transportasi kaum perempuan dipisahkan dengan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk melindungi kaum perempuan dari pelecehan yang

dilakukan kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

### Peran perempuan yang ideal

Aturan agama dan negara yang menjamin akan hak dan perlindungan terhadap perempuan selayaknya disinergikan agar terbentuk individu-individu perempuan yang berakhlakul karimah yang memiliki peran yang luas bukan saja dalam kehidupan domestik (rumah tangga) tetapi juga di kehidupan publik. Peran perempuan dalam kehidupan publik pada saat ini mendesak untuk diperluas bukan karena hal itu merupakan bagian dari hak perempuan, tetapi juga peran dan karya perempuan mendesak diperlukan karena urusan publik saat ini telah dicemari oleh sikap-sikap yang tidak terpuji kaum laki-laki.

Sehingga kita berharap dengan semakin besarnya peran perempuan dalam urusan publik, maka kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tentunya diharapkan yang dilahirkan tentunya diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Harapan ini merupakan sesuatu yang wajar karena dari sisi psikologis perempuan memiliki aspek perasaan yang lebih peka dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga diharapkan jika kebijakan-kebijakan dihasilkan dari pemikiran perempuan akan lebih peka terhadap kepentingan masyarakat luas bukan hanya kebijakan yang sarat dengan kepentingan semata.

Untuk membentuk peran perempuan ideal, maka kita perlu melakukan langkah-langkah:

**Pertama** peningkatan kualitas pendidikan kaum perempuan. Diskriminasi terhadap peran perempuan di masyarakat terjadi karena rendahnya pemahaman kaum perempuan akan hak dan kewajibannya sebagai perempuan. Karena

perempuan sama seperti laki-laki mempunyai sejumlah potensi dan kemampuan, sedangkan pendidikan merupakan proses yang menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi tersebut, dalam arti berusaha untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dasar tersebut dalam bentuk karya nyata dan peran perempuan di masyarakat.

**Kedua**, perlu peningkatan kualitas kesehatan kaum perempuan. Peran perempuan yang tidak maksimal di masyarakat saat ini tidak terlepas dari kualitas perempuan yang tidak sebanding dengan kualitas kesehatan perempuan karena secara fitrah perempuan memiliki ancaman kesehatan lebih besar di dibandingkan laki-laki. Dapat dibandingkan bagaimana perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengandung dan melahirkan serta menyusui anaknya yang pada masa itu rentan sekali timbulnya gangguan kesehatan hingga kematian.

Tingkat kesehatan perempuan lebih perlu diperhatikan karena resiko kesehatan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki jika dilihat akan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga maupun urusan publik. Begitu pula dalam urusan dalam mendidik anak. Perempuan mendapatkan porsi yang lebih besar dalam mendidik anak dari mulai mengandung hingga dewasa dibandingkan dengan peran laki-laki.

**Ketiga**, perlunya kebijakan negara yang memberikan kesempatan perempuan untuk berkiprah lebih luas dalam urusan publik. Kebijakan negara ini diperlukan karena dalam urusan publik pada saat ini kaum laki-laki cenderung menguasainya. Oleh karena itu agar perempuan dapat masuk lebih dalam urusan publik tersebut perlu didukung



dan didorong oleh kebijakan negara. Karena untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki di ranah publik, ternyata sistem yang ada sepertinya telah mapan dan tidak mendukung terhadap peran perempuan untuk berkiprah lebih banyak dalam urusan publik tersebut.

Contohnya, seperti dalam urusan keterwakilan perempuan di parlemen negara perlu memberikan aturan yang lebih mendukung perempuan agar perempuan memiliki peluang lebih banyak untuk masuk ke dalam parlemen sehingga perempuan lebih banyak ikut serta dalam menghasilkan kebijakan yang lebih mendukung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

### Penutup

Agama Islam menjamin persamaan hak bagi kaum perempuan baik persamaan di bidang keagamaan, persamaan dalam bidang hak milik dan hak usaha untuk memperoleh penghidupan, maupun hak-hak yang menjamin kemerdekaannya dalam pernikahan. Namun dalam realisasinya di masyarakat peran perempuan yang terpinggirkan baik secara kultural maupun struktural dalam berbagai segmen kehidupan sehingga perempuan hanya dipandang sebagai individu yang tidak lebih baik kualitasnya dari kaum laki-laki.

Faktor yang menyebabkan peran perempuan yang terpinggirkan, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan perempuan yang mengakibatkan rendahnya pemahaman perempuan terhadap hak dan kewajibannya. Selain itu adanya pergeseran pandangan salah terhadap upaya reposisi peran perempuan sehingga upaya tersebut kebablasan hanya sebatas ingin mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki.

Untuk membentuk peran perempuan ideal bukan saja dilakukan dengan perubahan dalam diri perempuan sendiri, tetapi juga harus didorong oleh perbaikan-perbaikan dalam berbagai sektor secara eksternal, seperti: (1) peningkatan kualitas pendidikan kaum perempuan, (2) perlu peningkatan kualitas kesehatan kaum perempuan, dan (3) perlunya kebijakan negara yang memberikan kesempatan perempuan untuk berkiprah lebih luas dalam urusan publik.

### Daftar Pustaka

- Abdul Jalil Isa. 1976. *Masalah-masalah Keagamaan*, Bandung: Al-Ma'rif.
- Asma' Muhammad Ziyadah. 2001. *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fathi Yakan. 1978. *Mengajak Umat Ke Jalan Allah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sayyid Mujtaba Musawi Lari. 1978. *Meraih Kesempurnaan Spiritual*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sayyid Quthb. 1983. *Ciri Khusus Citra Islam dan Landasan Dasarnya*, Bandung: Al-Ma'rif.
- Shalah Abdul Qadir. 1988. *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'rif.
- Syahminan Zaini, Hakekat Agama dalam *Kehidupan*, Al-Ikhas, Surabaya, tt.

*Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.*

(QS. Al-Hujurat: 13)